

Peran Layanan Pendidikan Gratis Dalam Penurunan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Di Kota Cilegon

¹Achmad Hendi Guslan Sutisna, ²Leo Agustino, ³Florentina Ratih

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Korespondensi : 7775210012@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program pendidikan gratis melalui program Pendidikan wajib belajar 12 tahun berdampak terhadap penurunan angka anak putus sekolah di Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif, dimana jenis penelitian tersebut menggambarkan secara langsung bagaimana dampak kebijakan Pendidikan gratis tersebut terhadap penurunan angka anak putus sekolah di kota cilegon. Dengan lokasi penelitian pada sekolah-sekolah yang menjadi sampel serta dinas Pendidikan kota cilegon sebagai informan pendukung. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu didapat hasil, Kota Cilegon menjadi wilayah di Provinsi Banten dengan angka anak putus sekolah (ATS) terendah disbanding wilayah lain di Provinsi Banten. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Cilegon konsisten dan serius terhadap dunia Pendidikan, sebagai salah satu contoh, Wali Kota Cilegon yang menerbitkan program sekola maning lur, untuk mengembalikan kembali anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke sekolah. Namun keberhasilan program tersebut belum terealisasi dengan optimla, karena masih terdapat anak yang tidak melanjutkan sekolah terutama dari SMP ke SMA. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal maupun internal, diantaranya faktor lingkungan, motivasi dalam diri anak, pertemanan, ekonomi, keluarga, sarana prasarana, dan akses menuju sekolah.

Kata kunci: Pendidikan Gratis, Mutu Pendidikan, Kebijakan

Abstract

This study aims to determine how the free education program through the 12-year compulsory education program has an impact on reducing the number of school dropouts in Cilegon City. This study uses a qualitative research method with a descriptive qualitative type, where this type of research directly describes the impact of the free education policy on reducing the number of school dropouts in Cilegon City. With the location of the study at schools that were samples and the Cilegon City Education Office as supporting informants. The results obtained from this study were that Cilegon City became the area in Banten Province with the lowest number of school dropouts (ATS) compared to other areas in Banten Province. This shows that the Cilegon City government is consistent and serious about the world of education, as one example, the Mayor of Cilegon who issued the sekola maning lur program, to return children who dropped out of school or did not continue their education to school. However, the success of the program has not been optimally realized, because there are still children who do not continue their education, especially from junior high school to high school. This is influenced by several external and internal factors, including environmental factors, motivation within the child, friendships, economy, family, facilities and infrastructure, and access to school.

Keywords: Free Education, Quality Of Education, Policy

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal dan memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi dan sikap profesionalisme tinggi yang dapat dicapai melalui Pendidikan. Pendidikan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk memperoleh

Pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan. Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari yang namanya Pendidikan. Dalam hal ini ialah Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri dari Pendidikan dasar, Pendidikan menengah dan Pendidikan tinggi. Pendidikan merupakan salah satu sarana meningkatkan keterampilan dan kecerdasan manusia, Pendidikan memegang peranan penting terhadap kemajuan pembangunan bangsa. Kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing juga tidak lepas dari Pendidikan, hal ini berarti mencerminkan bahwa kondisi Pendidikan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas sumber daya manusia di negara tersebut (Soetrisnaadisendjaja & Sari, 2019).

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik. Hal ini sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 bahwa "Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Rolos et al., 2022). Pendidikan merupakan suatu hal yang universal dalam kehidupan manusia, sehingga Pendidikan dapat dijadikan tolak ukur dalam melihat kualitas manusia itu sendiri. Terlebih lagi di era milenial seekarang ini, prubahan sosial yang begitu cepat juga menjadi tantangan besar bagi kehidupan masyarakat di semua lapisan (Busyairi Ahmad & Bonso, 2020).

Pendidikan yang baik dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkemauan dan berkemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkesinambungan. Masyarakat sangat membutuhkan Pendidikan karena Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, selain itu Pendidikan juga akan mengurangi angka kemiskinan, namun pada kenyataannya kemiskinan semakin hari semakin bertambah, akibatnya banyak menimbulkan pengangguran sehingga dapat menyebabkan tindakan kriminal semakin meningkat (Hardiyanti Sudarman, Chuduriah Sahabuddin & Latief., 2019). Oleh karena itu, peningkatan Pendidikan sangat penting menjadi perhatian semua pihak terlebih pemerintah. Tujuannya adalah agar menjadikan Pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu menjadi salah satu harapan bangsa Indonesia dalam penyeimbangan kemampuan skill secara internasional dan relevan dengan sumber daya alamnya agar mampu mengolah sumber daya alamnya sendiri. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan Pendidikan harus dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan keilmuan dan kualitas hidupnya, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat keluar dari semua problema kehidupannya berupa kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Dengan demikian, disamping dapat meeningkatkan taraf hidupnya, mereka juga dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di era global ini, dan bukan sesuatu yang tidak mungkin mereka akan menjadi aktor pereyasa masa depan (Hasbullah, M, 2015).

Kebijakan Pendidikan menurut (Bakry, 2010) sebagai kebijakan public adalah kebijakan Pendidikan berkaitan dengan upaya pemberdayaan peserta didik, kebijakan Pendidikan lahir dari ilmu praktis Pendidikan sehingga kebijakan Pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Selanjutnya, Pendidikan milik masyarakat (barang public) maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perlu di dengar dan di akomodasi. Kemudian merujuk kepada filsafat moral maka kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan public bukan kebijakan Pendidikan bagian dari kebijakan public. Adapun implementasi dari kebijakan tersebut harus mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan dalam UU dan peraturan tentang Pendidikan gratis itu sendiri (B Ahmad & Weyai, 2021).

Pembangunan Pendidikan, baik melalui pendidikan formal, dan nonformal di Indonesia dikembangkan secara sinergis oleh pemerintah, lembaga swasta, masyarakat dan perorangan. Setiap peluang dan potensi untuk mengisi pembangunan pendidikan yang tujuan utamanya pengembangan sumber daya manusia, hendaknya di isi dengan berbagai program pendidikan yang berkualitas dan professional (Jihadi R & Prihatin, 2017). Pendidikan merupakan suatu hal yang universal dalam

kehidupan manusia, sehingga pendidikan dapat dijadikan tolak ukur dalam melihat kualitas manusia itu sendiri (Ahmad & Bonso, 2020). Pendidikan merupakan salah satu hak mendasar yang wajib diterima manusia sebagai rakyat Indonesia, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Diterangkan bahwa setidaknya ada 10 hak mendasar yang melekat pada manusia. Adapun beberapa hak mendasar atau hak asasi manusia di Indonesia, antara lain hak hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi, hingga hak untuk mendapatkan pendidikan (Wahyuni & Pratiwi, 2021).

Pendidikan gratis diadakan dengan maksud untuk memberi pendidikan yang minimal bagi masyarakat untuk mengembangkannya, potensi keterampilan yang dimilikinya agar dapat hidup mandiri ditengah masyarakat atau dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi tanpa dipungut biaya (Hardiyanti Sudarman, Chuduriah Sahabuddin & Latief., 2019) Sistem pendidikan di Indonesia walaupun dalam konstitusi sudah memiliki landasan yang kuat, namun pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sesuai harapan (Rolos et al., 2022). Finlandia merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Negara yang terletak di ujung Benua Eropa ini memiliki sistem pendidikan yang unik dan menarik untuk disimak dan ditiru. Keunikan itu mulai dari menggratiskan biaya pendidikan, tidak adanya seragam dan Ujian Nasional (UN), serta suasana belajar yang tergolong santai dan informal. Finlandia dinobatkan sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, hal itu tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukan, yaitu menitikberatkan kualitas guru atau tenaga pengajar.

Pada tahun 2013, pemerintah pusat mengeluarkan program wajib belajar 12 tahun sebagai lanjutan dari program sebelumnya yaitu wajib belajar 9 tahun. Tujuan dari program lanjutan ini adalah untuk mempertahankan keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya, serta untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045 (Nazaruddin, 2024). Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 1 yang mendefinisikan bahwa Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan proses pembelajaran yang menyeluruh, mengasah kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian mulia, serta kecerdasan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan diri, masyarakat, bangsa dan bernegara. Dikatakan kembali oleh (Nazaruddin, 2024) bahwa pembangunan suatu negara membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai penggerakannya. hal ini dapat dicapai melalui pendidikan. namun, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti faktor lingkungan, fisik dan non-fisik. penuntasan wajib belajar 12 tahun dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal (dalam diri) dan faktor eksternal (luar diri) siswa. Faktor internal meliputi motivasi, disiplin, dan kemampuan belajar siswa. Sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan keluarga, lingkungan belajar, dan kondisi ekonomi. Program wajib belajar 12 tahun ditunjukkan kepada anak usia 7 tahun sampai 12 tahun untuk dapat menempuh Pendidikan dasar baik SD, MI, atau SLTA sederajat.

Provinsi Banten merupakan provinsi pemekaran dari provinsi Jawa Barat sejak 4 oktober 2000 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki 8 Kabupaten Kota salah satu nya yaitu Kota Cilegon. Provinsi Banten saat ini sudah berusia 24 tahun sejak memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dengan pusat pemerintahannya yang terletak di Kota Serang. Sudah hampir tiga dekade Provinsi Banten menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah. Masalah Pendidikan masih menjadi permasalahan di Kota Cilegon. Bagaimana pemerintah, para pendidik, lembaga-lembaga Pendidikan dan seluruh anggota masyarakat sebagai stakeholder yang sangat berkepentingan dengan Pendidikan harus menyikapi persoalan tersebut secara Bersama-sama dalam rangka menghadapi globalisasi yang sudah masuk ke segala sudut kehidupan masyarakat. Pendidikan seharusnya dapat mewujudkan manusia yang merdeka, mandiri, toleran, kompeten dan tanggung jawab. Bagaimana kurikulum dan proses pembelajaran dirancang dan

dilaksanakan agar dapat membantu proses pengembangan pribadi peserta didik sehingga mereka tidak kehilangan identitas dirinya ditengah-tengah masyarakat global.

Dikutip dari Banpos.CO dalam beberapa tahun terakhir, masalah anak putus sekolah di tingkat SD dan SMP di Provinsi Banten telah menjadi perhatian serius. Meskipun ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan pihak terkait, namun angka anak putus sekolah masih menghawatirkan. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran Pendidikan, serta beberapa faktor lain yang mempengaruhi ketersediaan Pendidikan yang layak bagi anak-anak di daerah tersebut. Berdasarkan data yang bersumber dari situs pd.data.kemdikbud.go.id pada tahun 2024 angka anak yang lulus namun tidak melanjutkan berdasarkan wilayah individu peserta didik, angka tertinggi berada di wilayah Kabupaten Tangerang dengan jumlah 6.099 jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan 8.426 jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak melanjutkan ke tingkat SLTA sederajat, sedangkan angka terendah berada di wilayah Kota Cilegon dengan jumlah 280 pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan 509 pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tantangan Pendidikan berikutnya adalah berlakunya otonomi daerah. Bagaimana selanjutnya lembaga-lembaga Pendidikan di daerah-daerah dapat menyikapi berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah. Bagaimana selanjutnya lembaga-lembaga Pendidikan di daerah-daerah dapat menyikapi berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah dan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Apa implikasi bagi perkembangan Pendidikan dan kebudayaan daerah, Pendidikan lokal dan pengelolaan lembaga-lembaga Pendidikan, system pembangunan sektor Pendidikan di daerah, kebijakan-kebijakan yang mesti meletakkan pembangunan sektor Pendidikan sebagai skala prioritas utama serta bagaimana menghadapi kendala-kendala yang ada di daerah-daerah. Beberapa masalah diatas wajib dijawab dan diselesaikan oleh pemerintah kota cilegon. Pembangunan Pendidikan di kota cilegon di akui masih menyisakan banyak masalah. Akses masyarakat untuk memperoleh Pendidikan 12 tahun wajib belajar juga masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pemerintah kota cilegon khusus nya dinas Pendidikan kota cilegon menyadari hal ini, Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan suatu daerah untuk meningkatkan kualitas manusia dalam beradaptasi dan berkompetensi, berjarya, berinovasi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas Pendidikan dikota cilegon akan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap kualitas pembangunan di Kota Cilegon.

Cilegon dikenal sebagai Kawasan industry. Sebutan lain dari Kota Cilegon adalah Kota Baja mengingat kota ini adalah penghasil baja terbesar di Asia Tenggara karena sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya di Kawasan Industri Krakatau Steel. Kota cilegon juga dikatakan sebagai kota maju dan Makmur. Hal ini dibuktikan bahwa kota Cilegon menempatkan UMK tertinggi diantara daerah lain yang ada di provinsi Banten. Kota cilegon salah satu kota di Provinsi Banten yang menerapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Pemerintah kota cilegon sangat mendorong kebijakan wajib belajar 12 tahun. Pemerintah kota cilegon mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan. Pemerintah kota cilegon menunjukkan komitmennya dalam menyediakan akses Pendidikan bagi masyarakat melalui penyebaran Sekolah yang cukup merata di seluruh kecamatan. Berikut tabel sebaran sekolah di Kota Cilegon:

Tabel 1
Data Jumlah Sekolah SD, SMP, SMA SMK di Kota Cilegon

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK
1	Jombang	34	13	4	8
2	Citangkil	27	7	3	5
3	Cibeber	25	8	3	5
4	Purwakarta	22	6	3	3
5	Ciwandan	21	5	5	1
6	Pulomerak	24	5	1	1
7	Cilegon	16	6	1	3
8	Grogol	15	3	2	0
Total		184	53	22	28

Sumber: Data Pokok Sekolah (Kemendikbudristek, 2024)

Tabel diatas menunjukkan bahwa kecamatan jombang memiliki jumlah SD terbanyak, sedangkan jumlah SD yang paling sedikit berada di kecamatan grogol. Hal serupa juga terjadi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pendistribusian sekolah-sekolah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas Pendidikan di Kota Cilegon. Kota Cilegon merupakan wilayah di Provinsi Banten yang turut serta dalam penerapan kebijakan wajib belajar 12 tahun dengan berbagai strategi dan pencapaian. Implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di kota cilegon, terlihat dari pembangunan sekolah baru, rehabilitasi sekolah lama, dan penyediaan sarana prasarana. Upaya peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan juga gencar dilakukan. Selain itu, pemerintah kota cilegon juga memberikan bantuan biaya Pendidikan, selain daripada pembangunan sekolah di daerah-daerah terpencil. Upaya berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan kualitas, menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk mencapai tujuan wajib belajar 12 tahun yang optimal.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendalami makna dibalik pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan mereka. Menurut (Harahap, 2020) penelitian kualitatif deskriptif pada dasarnya dipergunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dalam aturan kajian mikro. Terutama berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia (*behavior*) dan apa yang dibalik tingkah laku tersebut yang biasanya sulit untuk diukur dengan angka-angka. Karena apa yang kelihatan menggejala tidak selalu sama dengan apa yang ada di dalam pikiran dan keinginan sebenarnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial. Penelitian ini dilakukan secara mendalam dan menyeluruh, menggunakan kata-kata dan Bahasa untuk menggambarkan konteks alami dimana peristiwa tersebut. Berbagai metode alami digunakan untuk mengumpulkan data dan memahami realitas dari sudut pandang subjek (Moleong, 2016) Penelitian yang digunakan dengan tinjauan literatur, Adapun Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan tiga metode yaitu: observasi langsung di lapangan, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Dalam observasi, peneliti mencatat dan merekam informasi secara terstruktur dan semistruktur, termasuk dengan mengajukan pertanyaan kepada informan. Peneliti juga melakukan wawancara tatap muka dengan perwakilan dinas Pendidikan kota cilegon serta informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Selain itu, peneliti mengumpulkan dokumen publik yang relevan dengan penelitian, serta dalam pengamatan ini peneliti merekam dan mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti. Tidak hanya itu, peneliti turut mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif selama proses penelitian, dokumen ini berupa dokumen publik (Creswell, 2017). Lokasi penelitian dilakukan di SMP, SMKN, SMAN dan juga Dinas Pendidikan Kota Cilegon sebagai data atau informasi pendukung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota cilegon sebagai Kawasan industri merupakan kota yang cukup maju. Oleh karena itu, Pendidikan di kota cilegon tergolong di prioritaskan. Pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk ditempuh oleh warga masyarakatnya. Melalui Pendidikan, anak-anak akan memiliki masa depan yang baik. Masyarakat kota cilegon berusaha untuk menyekolahkan anaknya hingga Pendidikan tinggi karena tuntutan zaman yang kian berkembang. Kota cilegon yang sekarang menjadi Kawasan industri, secara tidak langsung membuat masyarakatnya berfikir ke depan. Sebelum kota cilegon menjadi Kawasan industri, Pendidikan masyarakatnya masih rendah dan masih banyak ditemukan fenomena anak putus sekolah. Namun, sejak kota cilegon menjadi kota industri dan perlahan berubah menjadi kota yang lebih maju, Pendidikan menjadi salah satu program yang di prioritaskan. Oleh karenanya, masyarakat mulai beradaptasi dengan adanya Kawasan industri melalui aspek sosial budayanya yang lebih memprioritaskan anak-anaknya untuk sekolah. Dampak dari aspek sosial budaya, masyarakat kota cilegon melihat peluang adanya Kawasan industri sehingga masyarakat setempat memandang Pendidikan merupakan hal yang penting, yang semula tidak memprioritaskan Pendidikan. Masyarakat kota cilegon saat ini rata-rata bersekolah sejak masih usia dini hingga perguruan tinggi. Karena pemerintah kota cilegon yang sangat peduli akan Pendidikan, oleh karena itu pemerintah memfasilitasi lembaga Pendidikan sejak PAUD (Pendidikan anak usia dini) hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Aspek sosial budaya yang terjadi di kawasan industri menuntut masyarakat kota cilegon untuk bersekolah mulai dari masyarakat yang mampu hingga masyarakat yang kurang mampu. Semua orang tua mengusahakan anaknya untuk tetap bersekolah mengingat semua anak yang berada di kota cilegon telah menempuh Pendidikan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi karena perkembangan zaman yang semakin maju serta didukung oleh adanya Kawasan industri yang berada di kota cilegon sehingga merubah pola pikir masyarakat untuk memperbaiki sumber daya manusia nya melalui Pendidikan.

Keseriusan pemerintah terhadap dunia Pendidikan di Kota Cilegon dalam usaha menurunkan angka anak putus sekolah melalui Pendidikan gratis, terbukti bahwa sebanyak 305 anak di Kota Cilegon yang sempat putus sekolah kini sudah dikembalikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon melalui program gerakan sekolah maning lur. Dikutip dari Detiknews, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengatakan bahwa Pemkot cilegon berhasil membujuk 305 masyarakat untuk Kembali bersekolah. Hal ini terungkap dalam kegiatan peringatan hari pendidikan nasional yang bertempat di rumah dinas Wali Kota Cilegon “Alhamdulillah dengan adanya program ini kita sudah membujuk kurang lebih 305 dari 428 orang yang ditemukan Pemkot Cilegon, dengan program sekolah maning lur ini sebanyak 305 masyarakat cilegon berhasil kita temukan untuk kita ajak melanjutkan sekolah” ungkapnya ada Detiknews. Helldy menjelaskan dengan Pendidikan dapat merubah ekonomi keluarga. Sebab Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap anak. Helldy kembali menambahkan “harapan saya Pendidikan ini dapat merubah ekonomi keluarga, dan Pendidikan ini merupakan kebutuhan dasar. Pendidikan ini bisa berdampak pada pengangguran, nagnggur miskin bisa terjadi yang namanya kriminalitas, jadi Pendidikan itu penting dan kita akan selalu perhatikan Pendidikan di cilegon (Detiknew,2024).

Program yang dibuat oleh pemerintah sudah cukup bagus dan membantu masyarakat khusus nya masyarakat yang ekonominya menengah kebawah atau yang kurang mampu. Program Pendidikan gratis melalui wajib belajar 12 tahun ini dimaksudkan agar generasi bangsa sekurang-kurangnya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga menghasilkan generasi-generasi yang bermutu dan berkualitas. Namun pada kenyataannya program ini masih belum berjalan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari data terkait anak putus sekolah atau anak yang tidak melanjutkan sekolah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Data Anak Tidak Sekolah (ATS) – Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

NO	Kabupaten/Kota	Dasar (SD)	Menengah (SMP)	Total
1	Kabupaten Pandeglang	3.043	4.194	7.237
2	Kabupaten Lebak	3.915	7.782	11.697
3	Kabupaten Tangerang	6.099	8.426	14.525
4	Kabupaten Serang	1.770	3.592	5.362
5	Kota Cilegon	280	509	789
6	Kota Tangerang	1.781	2.319	4.100
7	Kota Serang	2.089	1.222	3.311
8	Kota Tangerang Selatan	1.337	1.501	2.838
	Jumlah	20.314	29.545	49.859

Sumber: pd.data.kemdikbud.go.id,2024

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa angka anak putus sekolah atau anak tidak sekolah (ATS) atau lulus tidak melanjutkan wilayah individu di provinsi Banten, angka tertinggi berada di Kabupaten Tangerang dengan jumlah 6.099 pada jenjang sekolah dasar atau anak yang tidak melanjutkan ke tingkat SLTP sederajat, sedangkan pada kategori menengah atau SMP atau anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SLTA sederajat dengan jumlah 8.426. sedangkan wilayah dengan angka terendah anak tidak sekolah atau lulus tidak melanjutkan berada di wilayah Kota Cilegon dengan jumlah 280 pada jenjang sekolah dasar (SD) yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTP sederajat, sedangkan jumlah 509 pada kategori menengah (SMP) atau anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SLTA sederajat. Tabel 2 tersebut mnjadi bukti bahwa pemerintah kota cilegon khususnya dinas Pendidikan Kota Cilegon menaruh perhatian yang sangat serius terhadap Pendidikan, sehingga angka terendah di Provinsi Banten dengan kategori anak tidak sekolah (ATS) atau lulus tidak melanjutkan berada di Kota Cilegon.

Program yang dibuat oleh pemerintah yaitu Pendidikan gratis melalui wajib belajar 12 tahun, sudah berjalan dengan baik di Kota Cilegon, namun masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masih adanya anak yang tidak ingin melanjutkan sekolah karna di sebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. faktor eksternal berasal dari luar diri anak yang disebabkan oleh pertama, faktor lingkungan dimana anak terbawa temannya untuk membolos yang berdampak pada penurunan motivasi belajar pada anak. Yang kedua yaitu faktor ekonomi dimana anak terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan biaya dan harus membantu orangtuanya. Sehingga anak memutuskan berhenti sekolah dan bekerja. Kemudian faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri anak yang disebabkan karena anak putus sekolah mengalami sakit sehingga ia tidak bisa bersekolah (Soetrisnaadisendjaja & Sari, 2019). Selain ndari

faktor tersebut, ada faktor lain yang mempengaruhi anak putus sekolah atau anak tidak ingin melanjutkan sekolah. Faktor penyebab tersebut yaitu:

1. Faktor keluarga
Rendahnya pengetahuan orangtua dan latar belakang Pendidikan yang rendah menjadikan anak kurang memiliki cita-cita yang tinggi.
2. Faktor Ekonomi
Dengan keadaan ekonomi keluarga yang kekurangan, menyebabkan anak lebih berfikir untuk kerja membantu ekonomi keluarga daripada harus sekolah.
3. Keterbatasan Akses Menuju Sekolah
Hal ini biasa terjadi di daerah pelosok atau terpencil yang sarana prasarana jalan masih tanah dan jika musim hujan tiba, jalan tersebut susah untuk di akses. Jarak sekolah yang jauh dan tidak adanya transportasi umum yang mendukung, memicu anak untuk malas sekolah.
4. Minimnya Fasilitas Pendidikan di Suatu Daerah
Pemerintah telah berupaya pemeratakan Pendidikan di Indonesia. Namun untuk program Pendidikan gratis melalui program wajib belajar 12 tahun di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) belum bisa berjalan secara maksimal, khususnya dari tingkat SMP menuju SMA.

Keberhasilan dalam implementasi program Pendidikan gratis ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, melainkan juga tanggungjawab masyarakat. Jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama maka akan tercapai tujuan dari program tersebut. Kendala-kendala yang telah dipaparkan diatas tidak menjadikan program ini tidak terlaksana dengan baik. Pendidikan gratis melalui kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kota Cilegon hampir mencapai keberhasilan yang maksimal jika di bandingkan dengan kabupaten kota lain di Provinsi Banten. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pembangunan-pembangunan atau perbaikan sekolah di Kota Cilegon, program bantuan melalui beasiswa dan program Pendidikan lainnya guna mendukung keberhasilan program Pendidikan gratis di Kota Cilegon untuk menurunkan angka anak putus sekolah.

4. KESIMPULAN

Program sekolah gratis melalui Pendidikan wajib belajar 12 tahun di Kota Cilegon mencerminkan seriusnya pemerintah dalam meningkatkan mutu Pendidikan dan mempersiapkan generasi emas Indonesia, dan juga merupakan sebuah upaya yang diambil untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Jalur Pendidikan menjadi prioritas utama dengan alasan bahwa Pendidikan merupakan investasi jangka Panjang serta memiliki manfaat keberlanjutan. Penerapan program sekolah gratis memiliki pengaruh yang cukup besar. Dalam penerapannya, setiap orang tua sudah tidak dipungut biaya apapun untuk mensekolahkan anak. Keseluruhan kegiatan operasional sekolah ditanggung APBD. Dukungan penuh dari pemerintah Kota Cilegon, yang meliputi penyediaan akses Pendidikan, pembangunan infrastruktur sekolah, dan program beasiswa, merupakan bentuk komitmen yang kuat terhadap program ini.

Ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki Pendidikan yang ada di Indonesia khusus nya di Kota Cilegon yaitu dengan membuat program wajib belajar 12 tahun atau program sekolah maning lur yang di buat oleh pemerintah Kota Cilegon. Program ini merupakan program lanjutan dari wajib belajar 9 tahun. Program ini juga dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya sekaligus untuk menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045, hal tersebut terbukti dari data angka anak tidak sekolah (ATS) di Provinsi Banten, Kota Cilegon sebagai daerah dengan peringkat nomor satu atau daerah yang memiliki anak tidak sekolah (ATS) terendah dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Provinsi Banten. Namun pada kenyataannya

program Pendidikan gratis ini belum berjalan secara maksimal karna dipengaruhi beberapa faktor yang mengakibatkan masih adanya anak tidak sekolah atau anak yang tidak ingin melanjutkan sekolah yang diakibatkan karena faktor eksternal dan internal antara lain faktor keluarga, faktor semangat dari dalam diri, lingkungan pertemanan, akses menuju sekolah, faktor ekonomi dan faktor minimnya fasilitas Pendidikan.

5. SARAN

Berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan di atas, maka saran dari penulis adalah upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan Pendidikan di Kota Cilegon yang berkualitas harus terealisasi dengan baik. Untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas maka diperlukan Pendidikan sehingga pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi dan membuat strategi yang baik, agar memberikan kemudahan layanan dan menjamin terselenggaranya program Pendidikan gratis bagi masyarakat kota cilegon.

Peran keluarga juga sangat dibutuhkan dalam pemberian motivasi pada anak untuk bersemangat dalam melanjutkan sekolah, begitupun peran guru di sekolah dibutuhkan oleh peserta didik agar anak selalu termotivasi untuk belajar dan memahami bahwa pentingnya Pendidikan dalam keberlangsungan hidup.

Pentingnya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur Pendidikan yang merata di seluruh wilayah di Kota Cilegon, hal ini meliputi pembangunan sekolah baru, renovasi sekolah lama, serta penyediaan sarana prasarana yang memadai seperti laboratorium, perpustakaan dan akses internet. Dengan Langkah-langkah tersebut, diharapkan program Pendidikan gratis melalui wajib belajar 12 tahun di Kota Cilegon dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat khususnya anak di Kota cilegon.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, B, & Weyai, S. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP Negeri 4 Biak Timur Kabupaten Biak Numfor. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 1, 37–43. <https://www.e-journal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/146>
- [2] Ahmad, Busyairi, & Bonso, H. (2020). Peran Lembaga Pendidikan Nonformal Dalam Menangani Kemiskinan Di Era Milenial (Studi Kasus Loka Latihan Kerja Ukm Kabupaten Biak Numfor). *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8(2), 114. <https://doi.org/10.26858/jnp.v8i2.15519>
- [3] Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal Medtek*.
- [4] Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, dan Campuran*. Pustaka Belajar.
- [5] Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (ed.); Cetakan Pe). Wal Ashri Publishing.
- [6] Hardiyanti Sudarman, Chuduriah Sahabuddin, A., & Latief. (2019). *ANALISIS PENERAPAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR*. 1(September).
- [7] Hasbullah, M, H. (2015). *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. edisi ke 1.
- [8] Jihadi R, Z. I., & Prihatin, E. (2017). Pengaruh Kompensasi dan Iklim Organisasi Sekolah terhadap Kepuasan Kerja Guru non PNS Madrasah Aliyah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(1). <https://doi.org/10.17509/jap.v23i1.5570>

- [9] Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.
- [10] Nazaruddin. (2024). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 15(1), 55–60.
- [11] Rolos, M. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, VIII(113), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/38156/34866>
- [12] Soetrisnaadisendjaja, D., & Sari, N. (2019). Fenomena Anak Putus Sekolah di Kawasan Industri Kota Cilegon. *Hermeneutika : Jurnal Hermeneutika*, 5(2), 89. <https://doi.org/10.30870/hermeneutika.v5i2.7383>
- [13] Wahyuni, T., & Pratiwi, P. H. (2021). Sekolah Gratis Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pemangunan Manusia (Studi Di Kota Blitar, Jawa Timur). *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10(5), 1–8. <https://doi.org/10.21831/e-societas.v10i5.17186>